

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gerakan Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) 113 merepresentasikan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan yang berkonflik dengan PT. Berkas Sawat Utama (BSU). Dalam interval tahun 2016-2021, berbagai bentuk atau metode gerakan perjuangan agraria telah dilakukan oleh Kelompok SAD 113, seperti demonstrasi dan menginap di lingkungan sekitar kantor-kantor pemerintahan, aksi jalan kaki dari Jambi atau Pelabuhan Merak ke Jakarta dan aksi pendudukan lahan.

Dapat disimpulkan, dalam menjawab rumusan masalah yang Penulis ajukan dalam penelitian skripsi ini, dinamika gerakan perjuangan agraria Kelompok SAD 113 yang terjadi sepanjang tahun 2016-2021 adalah ‘pasang surut’ dalam perjalanannya. Gerakan perjuangan SAD 113 ada kalanya mengalami kenaikan intensitas dan penurunan intensitas atau fluktuatif. Dapat ditilik secara kentara pada tahun 2016-2020, gerakan perjuangan agraria yang dilakukan oleh Kelompok SAD 113 sangat masif terjadi. Mereka aktif turun ke jalan guna memperjuangkan hak agraria mereka. Sedangkan pada tahun 2021, Kelompok SAD 113 justru memilih untuk *zero movement* atau tidak melakukan gerakan sama sekali. Tidak ada satupun tercatat gerakan Kelompok SAD 113 yang terjadi sepanjang tahun 2021.

‘Pasang Surut’ gerakan perjuangan agraria SAD 113 tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, namun Penulis menemukan 3 faktor kunci yang memengaruhi dinamika gerakan SAD 113. Ketiga faktor kunci tersebut adalah praktik gerakan ‘jemput bola’, pengaruh Pendamping SAD 113 dan tindakan pemerintah dalam merespon gerakan SAD 113. Ketiga faktor tersebut yang memengaruhi intensitas gerakan SAD 113, apakah mengalami kenaikan atau kemunduran.

Di tengah terjadinya ‘Pasang Surut’, gerakan perjuangan agraria SAD 113 masih belum mampu untuk memengaruhi kebijakan publik guna memperoleh

pengakuan atas hak lahan mereka di dalam HGU PT. BSU. Sebagai gerakan masyarakat adat, keotonoman dalam mengelola lahan warisan nenek moyang mereka adalah *goals* utama dalam perjuangan mereka selama ini.

4.2 Saran

Kekosongan gerakan perjuangan agraria SAD 113 di lapangan sepanjang tahun 2021 perlu dipertimbangkan kembali untuk kedepannya bagi SAD 113. Langkah tersebut justru membuat pemerintah, terutama Pokja/Sub Pokja Penanganan Konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU, lebih lambat dalam bekerja. Alhasil, sepanjang tahun 2021 ini Pokja/Sub Pokja belum dapat mengupayakan terbitnya SK Gubernur Jambi yang mengatur subjek konflik SAD 113 dengan PT. BSU. Upaya melalui *follow up* kontak personal tidak terlalu berdampak dalam percepatan penyelesaian, dengan kata lain juga percepatan keberhasilan gerakan dalam memengaruhi kebijakan publik.

Apabila ke depan, SAD 113 masih tetap memilih untuk menurunkan intensitas gerakan mereka dalam jangka waktu yang lama, maka akan semakin lama SAD 113 memperoleh pengakuan atas pengelolaan lahan secara otonom. Namun, jika kedepannya SAD 113 mulai menunjukkan kembali kenaikan intensitas gerakannya, maka kemungkinan keberhasilan gerakan akan tampak lebih di depan mata.

Sedangkan bagi pemerintah, di tahun yang akan datang perlu membuat biaya konflik yang lebih terukur dan tersistematis. Hal ini adalah upaya menghindari terjadinya kekosongan anggaran di tengah penyelesaian konflik yang sedang berjalan. Jangan sampai hambatan-hambatan yang telah ditemukan tersebut hanya menjadi data semata tanpa ada upaya perbaikan. Termasuk perihal SDM, apabila memang kekurangan kuantitas dan kualitas, maka perlu dilakukan rekonstruksi kepengurusan, khususnya pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Bidang IV Penanganan Konflik.

Hadirnya gerakan perjuangan agraria SAD 113 sebenarnya juga dapat memantik pembenahan diri dalam tubuh pemerintah, khususnya Timdu PKS Provinsi Jambi. Maraknya gerakan sosial yang terjadi, ditambah dengan hambatan di dalam tubuh internal Timdu PKS Provinsi Jambi, seharusnya menjadi momentum agra organisasi mereka memperoleh dukungan kuantitas dan kualitas sumber daya yang lebih mumpuni. Dengan kata lain, menjadikan krisis sebagai lompatan besar dalam penanganan konflik di Provinsi Jambi, khususnya konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU yang sedang berlangsung saat ini.

Sedangkan bagi penelitian sejenis selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperdalam analisis dinamika gerakan perjuangan agraria SAD 113 dengan mengikutsertakan variabel potensi ‘penumpang gelap’ dalam gerakan tersebut. Selain itu, Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel analisis terkait anggaran atau biaya yang diperlukan/dikeluarkan dalam menghadirkan suatu gerakan sosial dan dari mana sumber pendanaannya. Perlu juga untuk memperluas cakupan narasumber penelitian, dengan menambahkan pihak perusahaan dan media massa guna memperoleh data yang lebih komprehensif.

Cakupan wilayah penelitian juga perlu diperluas, karena penelitian Penulis ini mengungkapkan jika konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU terjadi di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Lalu yang tak kalah penting, untuk mempertimbangkan dengan cermat agar dapat meneruskan penelitian ini karena konflik antara SAD 113 dengan PT. BSU belum usai. Gerakan yang terjadi sepanjang tahun 2016-2021 ini belum berhasil memengaruhi kebijakan publik yang merealisasikan tuntutan mereka.